

“Apakah ibadah dari rezeki yang abu-abu masih bernilai di sisi Allah?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pembuka. Pekan ini berita pejabat yang baru pulang haji lalu ditetapkan sebagai tersangka korupsi membuka kembali pertanyaan teologis lama yang sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai dijawab: bagaimana Islam memandang ibadah yang dilakukan oleh orang yang sumber rezekinya tidak sepenuhnya halal? Diskusi ini lebih rumit daripada yang sering disampaikan — dan kerumitan itu sendiri adalah pelajaran. Empat lensa fiqih klasik yang biasa dipakai memetakan pertanyaan ini, dan masing-

masing menunjukkan satu sisi dari kebenaran yang lebih besar dari satu sudut pandang.

Lensa pertama — sah secara fiqih. Mayoritas ulama Sunni — Syafi'i, Maliki, Hanbali — sepakat bahwa ibadah yang rukun-rukunnya terpenuhi (ihram, tawaf, sa'i, wukuf untuk haji; rukun shalat untuk shalat) adalah SAH meskipun pelakunya berdosa karena sumber dana yang haram. Madzhab Hanafi sedikit lebih ketat, tetapi mayoritas tetap di posisi yang sama. Logikanya: ibadah dinilai dari pemenuhan rukun, dosa sumber dananya adalah dosa terpisah yang ditanggung pelaku. Implikasinya: secara fiqih, haji pejabat yang korupsi tetap menggugurkan kewajiban haji baginya. Tetapi posisi ini hanya menjawab pertanyaan SEMPIT — yaitu apakah kewajiban gugur. Tidak menjawab pertanyaan yang lebih besar — apakah Allah menerimanya.

Lensa kedua — diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum ad-Din* (yang banyak dirujuk Nawawi al-Bantani dan ulama Indonesia) membedakan tegas antara *sihhah* (sah) dan *qabul* (diterima). Sah itu masalah fiqih luar; diterima masalah hubungan hati dengan Allah. QS. Al-Maidah: 27 — *Innamā yataqabbalullāhu minal-muttaqīn* — menjadi anchor untuk pemisahan ini. Allah tidak berfirman "menerima dari yang ibadahnya sah", melainkan "menerima dari orang yang bertaqwa". Implikasinya: seseorang bisa selesai dari kewajiban formal tetapi gagal di tingkat penerimaan ilahi. Kelemahan lensa ini: ia membuat banyak orang putus asa, karena tidak ada cara mengetahui dengan pasti apakah ibadah kita diterima. Ulama yang bijaksana selalu menambahkan: lakukan ibadah dengan ikhlas dan sumber halal, kemudian biarkan urusan diterima atau tidak menjadi rahasia Allah — jangan jadikan keraguan ini alasan untuk tidak beribadah.

Lensa ketiga — taubah dan koreksi. Ulama klasik (Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari*, juga Imam Nawawi) menegaskan bahwa jika seseorang menyadari rezekinya tercampur dengan yang haram, jalan yang benar adalah taubah yang lengkap: mengembalikan harta yang haram kepada pemiliknya (jika diketahui) atau menyedekahkannya

tanpa niat ibadah pribadi (jika tidak diketahui), kemudian melakukan ibadah dengan harta yang sudah dibersihkan. Implikasinya: pertanyaan "apakah hajinya sah" salah arah — pertanyaan yang benar adalah "apakah dia menjalani taubah yang lengkap setelah haji?" Yang menentukan posisi spiritualnya bukan haji itu sendiri, melainkan apa yang terjadi setelah dia tahu dirinya melakukan kesalahan. Kelemahan lensa ini: dia mengasumsikan kemampuan introspeksi yang banyak orang tidak punya. Bagi yang masih dalam denial, lensa ini tidak terlalu membantu.

Lensa keempat — sosiologis dakwah. Para ulama Indonesia kontemporer (KH Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahli Sunnah wal-Jama'ah*, juga Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*) menambahkan dimensi yang sering hilang: ketika kasus seperti ini menjadi konsumsi publik, pertanyaan utama bukan lagi nasib individu, melainkan KESEHATAN DAKWAH umat. Apakah komunitas Muslim cukup tajam untuk membedakan ibadah ritual dari amal saleh keseluruhan? Apakah dai-dai kita cukup berani mengajarkan bahwa haji yang dibiayai uang haram adalah AIB, bukan kebanggaan? Apakah masjid-masjid kita menerima sumbangan tanpa pernah bertanya sumbernya? Implikasinya: kasus pekan ini adalah cermin, bukan beban hakim. Lensa ini paling tajam karena ia memindahkan beban dari pelaku tunggal ke kondisi umat secara keseluruhan. Kelemahannya: mudah disalahgunakan untuk apologi — "jangan pikirin pejabat individu, pikirin umat" — yang bisa jadi cara halus menghindari akuntabilitas individu.

Sintesis yang tidak selesai. Keempat lensa tidak saling meniadakan. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang BERBEDA: sah-tidaknya kewajiban (lensa 1), diterima-tidaknya ibadah (lensa 2), jalan taubah (lensa 3), kesehatan dakwah komunal (lensa 4). Yang lemah dari satu lensa biasanya diisi oleh lensa lain. Tetapi tidak ada satu pun lensa yang berdiri sebagai jawaban tunggal. Untuk mahasiswa, pelajaran utamanya bukan menemukan posisi final — melainkan memahami bahwa pertanyaan teologis serius hampir tidak pernah punya satu

jawaban. Generasi yang dilatih mengelola kerumitan ini akan menjadi dai-dai yang lebih sabar dan presisi.

Penutup. Pertanyaan poster — "apakah ibadah dari rezeki abu-abu bernilai?" — sengaja dibiarkan terbuka karena jawabannya selalu kontekstual. Ada kasus di mana abu-abu itu kecil dan bisa dibersihkan dengan zakat; ada kasus di mana abu-abu itu dominan dan butuh restitusi total. Yang penting bagi setiap Muslim: jangan tergoda menjawab pertanyaan ini dengan cepat untuk diri sendiri ("ah, urusan saya sah kok"), dan jangan tergoda menjawabnya dengan keras untuk orang lain ("orang itu hajinya pasti tidak diterima"). Yang pertama itu nafs membela diri; yang kedua itu sok hakim. Sikap yang benar: telusuri rezeki sendiri jujur-jujuran, kemudian taubah dengan tulus jika ditemukan kekeruhan — sambil mempercayakan urusan penerimaan kepada Allah Yang Maha Pengasih.

I Pertanyaan

Q · 01

"Kalau sah saja sudah, kenapa kita harus pusing-pusing dengan diterima atau tidak?"

A

Karena dasar kita beribadah bukan untuk gugur kewajiban, melainkan untuk diterima oleh Allah. Memenuhi rukun secara teknis itu LANTAI MINIMUM. Yang membuat seseorang naik dari lantai ke ketinggian spiritual adalah kualitas niat dan kebersihan amalan di luar ibadah. Pertanyaan baliknya: kalau gugur kewajiban saja sudah cukup, kenapa Rasulullah ﷺ sendiri shalat malam sampai kakinya bengkak — beliau yang dijamin masuk surga? Karena gugur kewajiban bukan tujuannya; *qurb* (kedekatan) dengan Allah lah tujuannya.

Q · 02

"Bukannya menghakimi haji pejabat itu sama saja dengan ghibah dan suuzhan? Bukannya itu juga dosa?"

A

Pertanyaan ini valid sebagian — kita memang tidak boleh menghakimi nasib spiritual seseorang dengan pasti. Tetapi yang dibahas di artikel ini bukan menghakimi PEJABAT itu. Yang dibahas adalah KERANGKA berpikirnya, sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri. Tidak ada nama yang disebut; pertanyaannya ke kita: "apakah ibadahku dilakukan dengan rezeki yang bersih?" Itu pertanyaan yang sah untuk dipikirkan. Yang dosa adalah jika kita menyimpulkan dengan pasti bahwa Allah tidak menerima haji orang lain — itu memang melampaui hak manusia.

Q · 03

"Saya bukan pejabat, rezeki saya pas-pasan dan halal. Bukankah pelajaran ini tidak terlalu relevan?"

A

Justru paling relevan untuk yang rezekinya kecil dan jelas halal. Karena lensa kedua di artikel ini — sah vs diterima — bekerja di SETIAP level. Mungkin shalat kita sah secara fiqih, tetapi diterima atau tidaknya bergantung pada apa yang kita lakukan setelah shalat: apakah kita masih membohongi pelanggan, apakah masih menggunjingkan tetangga, apakah masih malas terhadap orang tua. Sah itu mudah; diterima itu pekerjaan seumur hidup. Pekerjaan ini sama beratnya untuk pejabat dan untuk warga biasa.

Q · 04

"Banyak ustadz dan dai juga sumber dananya tidak transparan — kenapa kita harus mendengarkan dakwah anti-korupsi mereka?"

A

Konsistensi standar memang penting. Tetapi pesan dievaluasi dari isi + dalilnya, bukan pembawanya. Yang masuk akal: terus menuntut transparansi sumber dana di lembaga dakwah, sebagaimana kita menuntut transparansi di lembaga negara. Jangan dijadikan alasan menolak pesan — tetapi juga jangan dijadikan alasan membela ketidak-konsistenan di kubu sendiri. Yang berbahaya adalah ketika kritik anti-korupsi hanya diarahkan ke pemerintah dan tidak pernah ke organisasi keagamaan — itu standar ganda yang merusak otoritas moral kritik itu sendiri.

"Saya mahasiswa rantau yang dibiayai keluarga. Saya tidak tahu sumber uang kiriman orang tua sepenuhnya bersih atau tidak. Apa yang harus saya lakukan?"

A

Ini pertanyaan yang banyak orang gemas tapi malu menanyakan. Jawaban ulama klasik (Imam Nawawi dalam **Riyad as-Salihin** bab tentang halal-haram): selama TIDAK ADA bukti kuat bahwa sumbernya haram, asumsikan halal — itu **baraa'atudz-dzimmah**, prinsip default kebersihan. Tetapi jika ada keraguan KUAT (misalnya orang tua bekerja di sektor yang jelas-jelas riba), bicaralah dengan orang tua secara baik — bukan sebagai anak yang menghakimi, melainkan sebagai anak yang ingin membantu menjernihkan. Jika tidak memungkinkan, perbanyak sedekah dari uang itu (sebagai bentuk pembersihan parsial), dan berdoalah untuk hidayah orang tua. Yang tidak boleh: berhenti makan dan menjadi beban yang lebih besar bagi keluarga sambil menyimpan rasa benar sendiri.